

## KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN

Oleh:

**Dortje L. Y. Lopulalan<sup>1)</sup>**

Email: [nor\\_lopulalan@yahoo.co.id](mailto:nor_lopulalan@yahoo.co.id)

### Abstrak

Komunikasi politik merupakan suatu sistem komunikasi yang berkaitan dengan jalinan pemerintah dengan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pentingnya sistem komunikasi politik dalam negara demokratis benar-benar terlaksana maksimal dan perlu dipertahankan. Hal tersebut berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, begitupun sebaliknya. Upaya pengagasan terhadap ide-ide dalam penulisan ini diperkaya dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif terhadap telaah pustaka dan berbagai referensi terkait dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah yang diperankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terbilang sebagai suprastruktur politik selalu berbarengan keterlibatannya dengan masyarakat yang terbilang sebagai infrastruktur politik. Dimana fungsi suprastruktur politik mewujudkan keseimbangan kekuasaan, yang kemudian mengkonversi proses pembuatan keputusan menjadi produk kebijakan publik yang nantinya disebarluaskan kepada masyarakat atau civil society. Pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik dan komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan.

**Kata kunci:** *Komunikasi Politik, Pemerintah.*

### A. PENDAHULUAN

Komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010). Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik.

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. *Pertama*, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Suprastruktur Politik, adalah sebuah kegiatan lembaga yang mengundang pada kegiatan terhadap komunikasi dan politik suprastruktur dengan fungsi pada lembaga pemerintah yang berkomunikasi untuk mencapai tujuan dalam pembangunan nasional

*Kedua*, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasi yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik.

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan juga kebijakan mengenai pemerintah. Maka komunikasi politik bukan hal yang baru, tetapi komunikasi politik juga bisa kita pahami sebagai suatu komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi Politik: Pemerintah dan Kebijakan**

Komunikasi politik sifatnya *multi-disciplinary study*, terutama dalam kaitan antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam konteks politik mengacu pada pendapat Graceau dalam Dan Nimmo (Dan Nimmo, 2005), proses politik merupakan pola interaksi yang menghubungkan antara warga negara dengan pembuat keputusan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama ataupun dalam konteks konflik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik (Yudhatama, I., 2017a).

Dalam suatu proses komunikasi politik, tindakan individual umumnya dileburkan ke dalam pola-pola tindakan bersama yang disebut dengan tindakan lembaga. Soemarno (2009) menjelaskan, peleburan tindakan spontan individu ke tindakan bersama yang bersifat kelembagaan ini, mewujudkan dalam penggunaan simbol-simbol komunikasi yang utamanya berada pada lembaga kekuasaan. Lebih lanjut Soemarno menjelaskan bahwa pengelola simbol-simbol ini dapat diakui keberadaannya melalui legalitas normatif, legitimasi demokratis, serta legitimasi moral. Legalitas normatif memberi jaminan dengan berdasar norma-norma yang berlaku dalam mengeluarkan produk kebijakan komunikasi yang mengakomodasi kepentingan publik. Legitimasi demokratis memberi jaminan pemerkuat karena didasari pengisian struktur kekuasaan yang dilakukan secara demokratis dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif. Legitimasi moral juga menjadi penjamin keberadaan pengelola simbol-simbol kekuasaan dengan dilandasi pertimbangan tentang baik atau buruk, serta kemampuan mempertanggungjawabkannya.

Jack Plano menyatakan, komunikasi politik adalah penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau partai politik. Namun, segala bentuk komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen (Saragih, R. dan S. A., 2017).

Dengan demikian, komunikasi politik merupakan suatu sistem komunikasi yang berkaitan dengan jalinan pemerintah dengan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Saragih, R. dan S. A., 2017).

Komunikasi politik dipandang sebagai orang yang menyampaikan pesan politik kepada khalayak untuk menyampaikan tujuan politik. Pesan yang disampaikan oleh komunikator politik ini berupa informasi. Sosialisasi kebijakan pemerintah, misalnya, informasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau informasi pelaksanaan Pilkada dan kandidatnya. Informasi ini harus melalui proses pematangan agar sebagai produk akurat.

Komunikator politik dapat disebut sebagai pihak yang memprakarsai penyampaian pesan kepada pihak lain dalam aktivitas politik. Dalam komunikasi politik, komunikator dapat dibedakan berdasarkan individu, lembaga atau kumpulan beberapa atau banyak orang (kolektif). Jika seorang tokoh atau pejabat, ataupun rakyat biasa bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual (*individual source*). Pada konteks lain meskipun seorang individu yang berbicara, tapi bila ia menjurubicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif.

Sumber individual saling berkaitan dengan sumber kolektif. Para pejabat birokrat sebagai sumber individual, tentunya, berada di bawah suatu pelaksanaan dan pengawasan pemerintah atau birokrasi. Pada tingkat pemerintah tersebut kebijakan direncanakan dan diputuskan untuk dilaksanakan. Tentang mereka yang berkedudukan sebagai birokrat, Katz dan Kahn (Susanto, Ek. H., 2009) mengemukakan,

“Seorang birokrat adalah anggota suatu birokrasi yang merupakan suatu organisasi dengan tugas melaksanakan suatu kebijaksanaan (*policy*) yang ditentukan oleh pembuat kebijaksanaan (*policy makers*).”

Seorang birokrat hanya dapat bekerja dalam bidang yang sudah ada aturannya. Apabila ada sesuatu hal yang belum ada peraturannya sebagai dasar pelaksanaannya maka seorang birokrat tidak merasa dirinya kompeten untuk melaksanakannya. Almond dan Powell dalam (Hasmawati, F., 2020) menggambarkan birokrasi pemerintah sebagai suatu kelompok yang terdiri dari para petugas dan jabatan yang dipertautkan melalui hirarki yang terperinci, dan tunduk kepada pembuat aturan formal. Birokrasi ditandai dengan adanya spesialisasi tugas, tanggung jawab, dengan aturan-aturan/prosedur yang formal dan standar. Karena itu, dalam kedudukannya sebagai komunikator, para birokrat merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan secara teknis dalam

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

bidangnya dan memiliki informasi yang bersifat esensial untuk pembuatan dan penegakan kebijakan publik.

Birokrat dan birokrasi memiliki kewajiban untuk mendukung suatu kebijakan yang telah diputuskan pemerintah dan menyebarkannya kepada khalayak. Misalnya, kebijakan tentang kenaikan tarif listrik, dan BBM. Kebijakan tersebut merupakan keputusan para pejabat pada tingkat eksekutif, setelah melalui persetujuan legislatif. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada rakyat secara luas oleh pejabat di birokrasi. Kebijakan kenaikan harga itu disetujui, dan diumumkan oleh pembantu presiden, yakni para menteri yang terkait. Kebijakan yang diputuskan dan disosialisasikan kepada masyarakat itulah informasi sebagai produk. Informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat, dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat menghasilkan pemahaman di antara kedua belah pihak. Menurut Nasution dalam (Saragih, R. dan S. A., 2017), rakyat membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka, dan pemerintah membutuhkan informasi mengenai apa yang rakyat inginkan dan harapkan dari pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan kritik dan masukan dari rakyat. Menurut Alfian, di sinilah komunikasi politik bekerja seperti sebuah sirkulasi darah. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah (1) sirkulasi darah yang mengalir tanpa hambatan, dan (2) nutrisi yang terkandung dalam darah. Jadi, tidak boleh ada hambatan dalam demokratisasi, seperti pembungkaman oleh pemerintah, *penbreidel-an* pers, atau ancaman, dan rakyat harus berkomunikasi dengan pemerintah dengan cara yang santun. Lalu, yang tidak kalah pentingnya, isi informasi dari kedua belah pihak harus benar, akurat, dan berkualitas, bukan atas dasar asumsi atau prasangka-prasangka. (Hasmawati, F., 2020)

fungsi komunikasi politik dalam pemerintahan adalah sebagai berikut: a) Memberikan informasi kepada masyarakat luas. b) Menjelaskan dan mendukung keputusan yang diambil. c) Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab; d) Mendukung dialog antara lembaga dan warga (Susanto, Ek. H., 2009).

Komunikasi politik dalam pemerintahan yakni proses penyampaian sebuah ide, strategi dan gagasan pemerintah pada kelompok masyarakat dengan maksud agar suatu tujuan negara dapat tercapai (Susanto, Ek. H., 2009). Maksud dari komunikasi pemerintah dalam konteks ini yakni dikategorikan sebagai komunikatornya, dan yang menjadi komunikan adalah masyarakat. Namun, hal tersebut bisa berbalik, masyarakat dapat menjadi komunikator ketika menyampaikan gagasan pada pemerintah dan di sini pemerintah berperan sebagai komunikan untuk menganalisis apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Dalam hal itu, pemerintah tentunya harus memenuhi keinginan masyarakat dengan mempertimbangkan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Komunikator sangatlah penting dalam berkomunikasi, sehingga komunikator pemerintah juga akan menentukan efektivitas dalam melangsungkan komunikasi.

Komunikasi politik dalam Pemerintahan harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menjelaskan secara rinci terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sehingga di sini masyarakat mendapatkan transparansi

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

dan tata kelola pemerintahan pun dapat berjalan dengan baik jika tidak ada tuntutan dari kalangan masyarakat.

## **2. Sistem Politik dan Komunikasi Politik Dalam Pemerintahan**

Dalam wilayah ilmu terapan (*das sein*), komunikasi politik sangat bergantung pada sistem politik tempat komunikasi diterapkan. Secara universal sistem politik menampakkan karakter sama yaitu terdiri dari dua sub-sistem, yaitu: 1. Sub-sistem suprastruktur (*the governmental political sphere*), sebagai sarana kehidupan politik pemerintah, dan 2. Sub-sistem infrastruktur yaitu suasana kehidupan politik masyarakat (*the socio political spare*). Kedua kondisi tersebut, saling berpengaruh secara berkaitan, sehingga suprastruktur sebagai cerminan dari infrastruktur, bahkan suprastruktur harus mengakomodasikan kehidupan infrastruktur, dan sebaliknya infrastruktur sebagai replika dari suprastruktur.

Menurut Robert Dahl dalam buku "*Modern Political Analysis*", sistem politik adalah: "*any persistent pattern of human relationship that involved to a significant of extent power, influence, control, rule or authority.*" Sistem politik menurut Dahl, sebagai pola tetap hubungan manusia yang terkait berbagai kepentingan tentang kekuasaan, pengaruh, pengendalian, aturan dan wewenang. Dari ungkapan ini, perlu dipahami tentang pola tetap, yaitu suatu pola yang telah baku dan telah menjadi standar atau ukuran dalam kehidupan negara. Pola tetap mengandung makna pula sebagai pola yang mendasar pada sistem nilai tertentu yang berlaku pada sistem tertentu pula. Demikian halnya komunikasi politik apabila sebagai suatu sistem maka komunikasi tersebut berada pada sistem tertentu.

Secara empiris, sistem komunikasi terpilah ke dalam empat sistem besar, yaitu:

1. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem totaliter (*authoritarianism system*).

2. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem liberal (*libertarian system*).

3. Komunikasi politik yang diaktualisasikan pada negara penganut sistem tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

4. Komunikasi politik yang diaktualisasikan dalam sistem komunis.

Untuk memahami semua sistem di atas, maka bisa kita mengacu kepada pendapat Jucuis yang menyatakan bahwa: "komunikasi baru akan berkembang, apabila tidak terikat oleh sejumlah peraturan yang mendominasi perkembangan opini publik yang ada pada masyarakat. Komunikasi dari bawah ke atas dengan menggunakan saluran tidak resmi baru dapat berjalan apabila struktur pemerintah membuka lebar terhadap masuknya input dari bawah (infrastruktur)". (Bruce Stinebrickner, 2015)

Gambaran Jucuis, hanya akan terjadi di negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak azasi, menghargai pendapat dan pemikiran orang lain. Negara yang termasuk negara demokrasi adalah seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan beberapa negara Eropa Barat. Pada negara-negara demokrasi, potensi mengarah ke demokratisasi komunikasi (*democratization of communication*) lebih memungkinkan, karena lembaga negara benar-benar menjalankan fungsi input sehingga terjadinya dinamika munculnya pendapat umum. Selanjutnya,

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

demokratisasi komunikasi ini menurut Sean MacBride memberikan batasan sebagai berikut: “Demokrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana: a) individu dijadikan sebagai partner yang aktif dan tidak sebagai objek komunikasi saja; b) meningkatnya pesan yang dipertukarkan; dan c) mendorong perkembangan dan kualitas komunikasi yang mewakili masyarakat.” (Bruce Stinebrickner, 2015)

Pendapat MacBride ini, memberikan suatu perspektif adanya sistem input dan output yang seimbang, dimana suprastruktur membutuhkan respons atau feedback sebagai bahan kebijakan komunikasi (*communication policy*).

Pada negara totaliter, komunikasi hanya berjalan satu arah tanpa respons atau umpan balik (feedback) secara benar dari arah berlawanan. Sistem-sistem totaliter tidak memberi ruang adanya pusat-pusat kekuasaan lainnya, selain partai tunggal atau partai dominan. Partai tunggal akan menguasai seluruh aspek kehidupan seperti yang terjadi di Korea Utara di era sekarang (negara komunis sebagai model negara totaliter baru).

Dalam sistem demokrasi, pengelolaan sumber-sumber komunikasi dibagi ke dalam tiga fungsi kekuasaan, yaitu:

1. Eksekutif (fungsi pemerintahan).
2. Legislatif (fungsi pembentukan Undang-Undang).
3. Yudikatif (fungsi pengadilan).

Dari ketiga fungsi memang yang mempunyai pengaruh secara dominan kekuasaan adalah eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, namun kedua fungsi lainnya legislative dan yudikatif mempunyai peran yang tidak bisa digantikan oleh pemerintah atau fungsi-fungsi lembaga yang lainnya.

Dari semua fungsi-fungsi sumber kekuasaan tersebut tidak akan bermakna bisa tidak terjadi komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi ruh dan penggerak dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara akan bergerak dengan administrasi negara sebagai urat nadinya dan komunikasi sebagai jiwanya.

Dalam mengisi struktur kekuasaan maka komunikasi berfungsi sangat efektif. Komunikasi berfungsi memotivasi dan mengkondisikan pendapat umum agar mendukung terselenggaranya pengisian struktur kekuasaan. Dalam mengisi struktur kekuasaan diselenggarakan melalui proses demokrasi yang disebut pemilihan umum. Untuk mengisi struktur perwakilan atau lembaga legislative maka rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui pemilihan partai politik, sedangkan untuk memilih pimpinan eksekutif yaitu presiden maka rakyat memilih sistem pemerintahan presidential.

Jadi suasana komunikasi politik berada dalam dua suasana yaitu suprastruktur komunikasi dan infrastruktur komunikasi. Pada suprastruktur komunikasi terdiri dari para pengelola sumber komunikasi sesuai dengan fungsi kekuasaan. Sedangkan pada infrastruktur atau suasana komunikasi masyarakat yang terdiri dari para pengelola sumber komunikasi sesuai kebutuhan unsur-unsur yang ada pada infrastruktur.

Adapun menurut G.A. Almond dan S. Coleman infrastruktur politik dikualifikasikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

1. Partai Politik (*political party*).
2. Golongan Kepentingan (*interest group*).

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

3. Golongan Penekan (*Pressure group*).
4. Tokoh Politik (*political figure*),
5. Alat-alat (media) Komunikasi Politik (*Political communication tools*).  
(Cornish, L., & Dunn, A. (2009)., n.d.)

Kelima kelompok tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan politik, karena mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa dan mampu untuk memobilisasi pendapat umum agar berpihak kepada mereka. Karena itu elit-elit suprastruktur sangat berkepentingan untuk selalu menjalin komunikasi dengan elit-elit infrastruktur, terutama di dalam mempertahankan status kekuasaannya. Kelompok-kelompok infrastruktur tersebut merupakan komunikatorkomunikator politik yang selalu berusaha mengembangkan pengaruh untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran atau pergantian elit berkuasa melalui proses pemilihan umum.

Sistem Politik adalah sistem yang digunakan dalam suatu negara dan memiliki suatu pola yang tetap serta telah memiliki badan atau organisasi. Sistem politik terdiri dari struktur politik yang merupakan satu kesatuan dan memiliki fungsi masing-masing dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara. Menurut sejarahnya, Indonesia memiliki sistem politik yang berganti-ganti, di antaranya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi pancasila. (Kartiwa, Asep, 2013).

Sedangkan kebijakan komunikasi sebagai bentuk komunikasi politik dalam pemerintahan menurut (Abrar, A. N., 2008) didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur komunikasi masyarakat yang dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media). Namun sampai saat ini kebijakan komunikasi yang dirumuskan masih menyangkut media massa (penyiaran, pers, dan film). Terdapat beberapa jenis kebijakan komunikasi di Indonesia, di antaranya: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Beberapa contoh kebijakan komunikasi di Indonesia yaitu UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 53 Tahun 2000, Keppres No.153 Tahun 1999, juga Inpres No.6 Tahun 2001.

Apabila dicermati, kebijakan komunikasi disusun oleh lembaga-lembaga yang berada dalam sistem politik di sebuah negara, contohnya Undang-Undang yang disusun oleh DPR, Keputusan Presiden disusun oleh presiden, juga Surat Keputusan Menteri disusun oleh Menteri. Hal ini kemudian memperjelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena dengan adanya sistem politik maka akan tercipta kebijakan komunikasi yang dimaksudkan sebagai peraturan yang mengatur masyarakat di suatu negara.

Kriteria kebijakan komunikasi atau komunikasi politik dalam pemerintahan, yaitu:

- Memiliki Tujuan Tertentu (misalnya bertujuan agar sistem komunikasi dapat berjalan dengan lancar).
- Berisi Tindakan Pejabat Pemerintah (kebijakan disusun oleh pejabat pemerintah).

Memperlihatkan Apa yang akan Dilakukan Pemerintah (karena tujuan pembuatan kebijakan komunikasi adalah untuk diteruskan menjadi kebijakan).

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

- Bersifat Positif atau Negatif (sisi positifnya: dapat menciptakan perubahan dan mudah diimplementasikan; sisi negatifnya: kebijakan dapat tarik menarik sebuah kepentingan).
- Bersifat Memaksa (kebijakan komunikasi dibuat oleh pemerintah sehingga menjadi sebuah peraturan yang sifatnya memaksa).

Kebijakan komunikasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Pertama, tujuan dalam hal sosiologis. Dimaksudkan bahwa kebijakan komunikasi merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak ingin merugikan siapapun, dalam hal ini pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang merumuskan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, kebijakan komunikasi harus menjamin bahwa masyarakat ikut ambil bagian dalam perkembangan komunikasi dan tidak terpengaruh dengan pihak lain (penguasa).

Pentingnya sistem komunikasi politik dalam negara demokratis benar-benar terlaksana maksimal dan perlu dipertahankan. Hal tersebut berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, begitupun sebaliknya. Sebagai negara yang demokratis, Indonesia terdapat sistem komunikasi politik yang baik antara pemerintah sebagai komunikator (pengirim pesan) dengan masyarakat sebagai komunikan (penerima pesan), ataupun sebaliknya.

Kehadiran pemerintah yang diperankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terbilang sebagai suprastruktur politik selalu berbarengan keterlibatannya dengan masyarakat yang terbilang sebagai infrastruktur politik. Dimana fungsi suprastruktur politik mewujudkan keseimbangan kekuasaan, yang kemudian mengkonversi proses pembuatan keputusan menjadi produk kebijakan publik yang nantinya disebarluaskan kepada masyarakat atau *civil society*.

Respon masyarakat atau *civil society* sebagai infrastruktur politik dapat berupa aspirasi, mendukung, menolak produk kebijakan, demonstrasi, itu semua menunjukkan penerapan komunikasi politik yang perankan oleh infrastruktur politik.

### **3. Pola Komunikasi Politik Pemerintah**

Dalam sistem politik, komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik (*The govermental political sphere*) dengan situasi kehidupan dalam infrastruktur politik (*Socio political sphere*). Infrastruktur politik terbagi dalam asosiasi-asosiasi, antara lain: partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), para tokoh politik (*political figures*), media komunikasi politik (*media of political communication*). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik berperan penting dalam komunikasi pembangunan. Keberhasilan komunikasi pembangunan sangat ditentukan oleh pola komunikasi politiknya (Aly, B, 2010). Pola komunikasi politik sangat tergantung dari sistem politik yang dibangun dalam suatu masyarakat.

Ada dua model pola komunikasi politik yang dikenal dalam kajian komunikasi politik yakni, (1) pola komunikasi politik horizontal, di mana posisi pelaku komunikasi yang terlibat dalam proses komunikasi politik relatif setara dan seimbang sehingga terjadi sharing atau saling berbagi informasi atau dialogis, bentuk atau pola komunikasi politik semacam ini hanya dapat terjadi dalam

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon



sebuah sistem politik yang demokratis; (2) pola komunikasi politik yang berbentuk vertikal atau top down. Arah komunikasi cenderung satu arah menunjukkan sistem politik yang merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan pola kepemimpinan yang totaliter (Panuju, 1994) dalam (Yudhatama, I., 2017a).

Oleh karena itu, dalam sistem politik, komunikasi berperan untuk menghubungkan lingkungan aktivitas politik yang ada pada suprastruktur politik dengan situasi kehidupan dalam infrastruktur politik yang terdiri dari asosiasi-asosiasi, antara lain: partai politik, kelompok kepentingan, para aktor politik, saluran komunikasi politik. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik memiliki peran penting dalam proses komunikasi pembangunan. Kesuksesan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan amat banyak ditentukan oleh pola komunikasi politiknya (Aly, B, 2010). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik. Sedangkan menurut Alfian (1993), komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan (Yudhatama, I., 2017b).

Pola hubungan kegiatan komunikasi politik dalam pemerintahan yang mencerminkan dinamika dalam prosesnya dapat meliputi:

1. Pola komunikasi vertikal (*top down*, dari pemimpin kepada yang dipimpin);
2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok);
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal);
4. Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi) (Mukarom, Z., 2020).

Prinsip-prinsip Komunikasi politik dalam pemerintahan , yaitu:

- Keterbukaan.
- Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.
- Keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
- Presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
- Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
- Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
- Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe dalam *Government Communicators' Handbook* menyatakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik.
- Sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik tersebut.

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

- Para pejabat politik adalah komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan.
- Setiap orang dalam pemerintahan adalah seorang komunikator.
- Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu.
- Struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan.
- Komunikasi lebih dari sekedar media perantara.
- Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik.
- Dalam mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha untuk memahami lingkungan komunikasi.
- Kampanye komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah.

Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kepada publik.
- Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan.
- Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
- Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.
- Hambatan Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan tidak luput dari berbagai hambatan. Simon, Smithburg, dan Thomson dalam *Handbook of Administrative Communication* menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi.

Komunikasi pemerintahan yang baik dapat berkontribusi pada pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun antara Negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep pemerintahan yang baik, yaitu:

- Negara/pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat.
- Swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan.
- Masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- Pemerintahan yang baik memerlukan tiga hal yaitu *state capability, accountability, dan responsiveness*.

Secara konseptual, Cangara dalam (Mukarom, Z., 2020) menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga pola komunikasi politik yang di antaranya adalah sebagai berikut.

#### 1. Pola Sistemik

Model ini merupakan pola komunikasi politik yang utuh, satu-kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya dan saling terhubung antara yang satu

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

dengan yang lainnya. Teori dalam model ini merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan di antara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan atau disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel.

## 2. Model Proses

Dinamika komunikasi politik sangat berkaitan dengan model komunikasi, yaitu model transaksi simultan dari Melvin L DeFleur. Dengan karakternya yg *non-linear*, model ini menggambarkan tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi. Sistem komunikasi ini akhirnya akan membentuk model-model dari proses komunikasi politik. Pertama adalah faktor lingkungan fisik, yaitu tempat dimana komunikasi berlangsung dengan menekankan pada aspek *what and how*. Kedua, faktor situasi sosio-kultural, yaitu komunikasi merupakan bagian dari situasi social yang di dalamnya terkandung makna cultural dan menciptakan identitas bagi para pelaku komunikasi. Ketiga, faktor hubungan sosial, yaitu status hubungan para pelaku komunikasi sangat berpengaruh baik terhadap isi pesan ataupun terhadap proses bagaimana pesan tersebut dikirim dan diterima. Selain itu proses komunikasi politik juga dapat melalui proses komunikasi persuasif dan kampanye media.

## 3. Model Efektivitas

Kemampuan seorang tokoh dalam mengirimkan pesan atau informasi yang baik, kemampuan menjadi pendengar yang baik, kemampuan atau keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang efektif. Komunikasi politik juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan pemasaran politik. Bagaimana sebuah komunikasi politik yang efektif dan tepat sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik sebagai suatu strategi persaingan dalam dunia politik.

## C. Kesimpulan

Pentingnya sistem komunikasi politik dalam negara demokratis benar-benar terlaksana maksimal dan perlu dipertahankan. Hal tersebut berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, begitupun sebaliknya. bahwa kehadiran pemerintah yang diperankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terbilang sebagai suprastruktur politik selalu berbarengan keterlibatannya dengan masyarakat yang terbilang sebagai infrastruktur politik. Dimana fungsi suprastruktur politik mewujudkan keseimbangan kekuasaan, yang kemudian mengkonversi proses pembuatan keputusan menjadi produk kebijakan publik yang nantinya disebarluaskan kepada masyarakat atau civil society. Pola interaksi antara warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah proses komunikasi dalam konteks politik dan komunikasi politik merupakan bagian dari sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi berbagai kebijakan.

---

<sup>1)</sup> Dortje L. Y. Lopulalan, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unpatti Ambon

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (2008). *Kebijakan komunikasi: Konsep, hakekat dan praktek*. Penerbit Gaya Media.
- Aly, B. (2010). Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2),. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.8.2>.
- Ardial,. (2010). *Komunikasi Politik*. PT Indeks.
- Bruce Stinebrickner. (2015). Robert a. Dahl and the essentials of modern political analysis: Politics, influence, power, and polyarchy. *Journal of Political Power*, Volume 8,(Issue 2), Pages 189-207.
- Cornish, L., & Dunn, A. (2009). (n.d.). Creating knowledge for action: The case for participatory communication in research. *Development in Practice*, 19(4–5), 665-677. <https://doi.org/10.1080/09614520902866330>
- Dan Nimmo. (2005). *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hasmawati, F. (2020). Karakteristik Komunikator Yang Efektif Dalam Komunikasi Antar Pribadi. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, 4(2), 69-95.
- Kartiwa, Asep. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-teori komunikasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saragih, R. dan S. A. (2017). Peran Komunikasi Politik Pemerintahan Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana desa. *REFORMASI*, 7(1), 59–69.
- Susanto, Ek. H. (2009). *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah. Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan* ((A. C. W. Wardani (ed.)).). [file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMEN BUKU 1.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/DOKUMEN%20BUKU%201.pdf)
- Yudhatama, I. (2017a). Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2172>
- Yudhatama, I. (2017b). Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 205. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2172>.